



RENCANA KERJA

**DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN MALINAU**

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini atas dasar usulan program/kegiatan/Sub Kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja 2022 ini merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan Renstra 2016-2021.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Malinau, Rabu 17 Maret 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau,



Drs. Agustinus, M.AP

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670217 199312 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
 Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	11
2.1.A. Pengolahan Data dan Informasi	11
2.1.B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
 Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	53
 Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
 Bab V PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/ kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di Kabupaten Malinau pada khususnya.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kerja.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaa Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Malinau merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagai pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Komunikasi Dan Informatika.

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Visi Bupati Malinau, yaitu: ***“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”***. Penjelasan visi tersebut yaitu:

1. Kabupaten Malinau yang MAJU adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
2. Kabupaten Malinau yang SEJAHTERA adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan;

berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

3. Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, diemban 12 (dua belas) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;

8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”;
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Beberapa program utama yang tertuang sebagai penjabaran dari Misi Bupati, peran Diskominfo Kabupaten Malinau merujuk pada Misi Ketiga yaitu terkait dengan “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalam maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**”.

Sedangkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, maka kebijakan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2022 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan SKPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

Penyusunan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 juga dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, rencana investasi dan program/kegiatan/sub kegiatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2016-2021 dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2015-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) Kabupaten Malinau, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Malinau.

Penyusunan Rencana Kerja dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2022. Adapun Tujuan disusunnya renja tahun 2022 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Kerja Awal (Ranwal) Dinas Komunikasi dan Informatika agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik:

1.1 Latar Belakang

Berisi pengertian ringkas tentang Rencana Kerja, proses penyusunan Rencana Kerja, keterkaitan antara Rencana Kerja Awal dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.A. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja PD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek Kondisi pelayanan Perangkat Daerah, Organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah, Kondisi dan rencana tata ruang wilayah, Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Rancangan awal RKPD tahun rencana, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1.B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Tabel yang disajikan adalah **tabel T-C.29.** yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah Diskominfo.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah:

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format **Tabel T-C.30.**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Berisi uraian singkat mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
4. Menyajikan Tabel **T-C.31**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Merupakan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat. terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang. Penyajian dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tabel yang disajikan berupa **Tabel T-C.32**.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan **Tabel T-C.33**.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V P E N U T U P

Berisi uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.A. Pengolahan Data dan Informasi

Sejak dibentuk pada tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten melakukan pelayanan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi dan komunikasi dan statistic, bidang layanan infrastruktur teknologi informatika komunikasi e-government, bidang keamanan informasi dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Malinau.

Organisasi dan tatalaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagai pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Komunikasi Dan Informatika.

Kondisi dan rencana tata ruang wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selalu mempertimbangkan sinergi RPJMD Kabupaten Malinau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pengembangan kawasan strategis baik pengembangan ekonomi, penguatan sosial budaya, pengelolaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan penguatan daya dukung lingkungan. Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Malinau diarahkan untuk mengembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Long Nawang, kawasan strategis nasional kabupaten Malinau, yaitu Kawasan Perbatasan darat RI dengan Serawak Malaysia, Heart of Borneo (HoB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Ibu Kota Kabupaten Malinau di Malinau Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan prioritas sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, serta industri.

Sementara itu, pengembangan kawasan andalan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan kawasan andalan di Kabupaten Malinau diutamakan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang meliputi:

- (1) pengembangan Klaster: pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan Kawasan Agropolitan;
- (2) pengembangan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan pengolahan hasil pertanian serta perkebunan;
- (3) pengelolaan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;
- (4) pengembangan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan optimalisasi kawasan eksplorasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah termuat dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Pasal 5 tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Malinau, Pasal 12 tentang Sistem Jaringan Prasarana lainnya (Point b) mengenai Sistem Jaringan Telekomunikasi, Pasal 14 tentang Sistem Jaringan Telekomunikasi yang terdiri dari Sistem Jaringan Kabel, Sistem Jaringan Nirkabel dan Sistem Jaringan Satelit.

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2011-2016 diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), dan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) serta kawasan strategis kabupaten. Fokus penataan ruang dilakukan dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal dan kota pusat pertumbuhan. Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

- (1) pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah;
- (2) pengembangan pusatpusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang;

- (3) pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten;
- (4) Pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan serta sumberdaya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- (5) pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah.

Rancangan awal RKPD tahun 2022 dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan total perencanaan pendanaan sebesar Rp. 10.971.988.185,00. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut juga merupakan hasil daripada usulan masyarakat melalui kegiatan Musrembang baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Usulan-usulan tersebut ada yang dapat kami laksanakan/penuhi dan ada juga yang tidak dapat kami penuhi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi ketersediaan dana ataupun SDM Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri.

2.1.B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2020 yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 9.418.111.583,72 (Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen) yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 4.096.989.465,40 (Empat Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sen) dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 5.321.122.118,32 (Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah Koma Tiga Puluh Dua Sen).

Realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.971.988.185,00 Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah atau sebesar 96,95% dari target 100%, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.168.468.108,00 (Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan

Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah) atau sebesar 97,13 % dari target 100%,

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Pada tahun 2020 tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, semua program/kegiatan secara fisik dan keuangan terlaksana dengan sangat baik.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan: **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
531.063.421,02	-	-	511.863.421,00	96,38	19.200.000,02

2. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan: **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
52.669.340,31	-	-	52.669.000,00	99,99	340,31

3. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan: **Penyediaan Makanan dan Minuman**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
21.067.736,12	-	-	21.060.000,00	99,96	7.736,12

4. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan: **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
221.458.482,19	-	-	218.193.936,00	98,53	3.264.546,19

5. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan: **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
113.047.600,00	-	-	109.807.200,00	97,13	3.240.400,00

6. Program: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Kegiatan: **Sewa Bandwith Internet Kantor Bupati**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
746.000.000,00	-	-	722.035.440,00	96,79	23.964.560,00

7. Program: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Kegiatan: **Sewa Bandwith Transponder dan Internet Kecamatan**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
1.598.460.000,00	-	-	1.504.361.452,00	94,11	94.098.548,00

8. Program: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Kegiatan: **Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemkab Malinau**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
50.646.977,72	-	-	50.646.977,00	100	0,72

9. Program: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Kegiatan: **Pemeliharaan Perangkat Jaringan Komputer**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	100	-

10. Program: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Kegiatan: **Pemeliharaan CCTV Keamanan**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
45.813.745,66	-	-	43.470.000,00	94,88	2.343.745,66

11. Program: Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan: **Penyusunan Statistik Kabupaten Malinau**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
74.677.032,00	-	-	74.521.800,00	99,79	155.232,00

12. Program: Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan: **Penyusunan Infografis Pembangunan Daerah**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
62.680.000,00	-	-	62.299.375,00	99,39	380.625,00

13. Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kegiatan: **Pengadaan BBM untuk Tower Telekomunikasi**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
1.220.869.000,00	-	-	1.220.851.785,00	100	17.215,00

14. Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kegiatan: **Diseminasi Informasi Melalui Media Digital**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
79.511.438,67	-	-	77.877.600,00	97,95	1.633.838,67

15. Program: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo
Kegiatan: **Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
186.917.540,17	-	-	185.308.000,00	99,14	1.609.540,17

16. Program: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo
Kegiatan: **Pemeliharaan Perangkat SISIKOMPAD**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
178.410.882,46	-	-	175.673.200,00	98,47	2.737.682,46

17. Program: Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kegiatan: **Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi**

Pagu Anggaran	P-APBD	Rasionalisasi Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
87.828.922,00	-	-	87.828.922,00	100	-

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Tidak ada kegiatan yang melebihi target kinerja, dikarenakan semua kegiatan umumnya telah terencana dengan baik.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Untuk tahun 2020 semua kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Pada tahun 2020 Dinas Kominfo telah melaksana 7 Program dengan 17 Kegiatan yang secara keseluruhan tingkat pencapaiannya diatas 95% untuk persentase keuangannya dan 99,99% untuk realisasi fisiknya, artinya dengan tingkat pencapaian yang tinggi tersebut akan berpengaruh terhadap target capaian program renstra OPD ke tingkatan yang tinggi.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Tahun 2020 semua program dan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Tabel yang disajikan adalah Tabel **T-C.29** sebagai berikut:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (tahun berjalan) dan proyeksi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel **T-C-30** sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Diskominfo Kab. Malinau

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Relaisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2.10	Komunikasi dan Informatika									
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2.10.01.01.01.18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	204 Rapat & Koordinasi	60 Rapat & Koordinasi	48 Rapat & Koordinasi	48 Rapat & Koordinasi	100%	48 Rapat & Koordinasi	156	76%
2.10.01.01.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	215 Jenis	70 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	100%	45 Jenis	165	77%
2.10.01.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat yang dilakukan	192 Rapat & Koordinasi	48 Rapat & Koordinasi	48 Rapat & Koordinasi	48 Rapat & Koordinasi	100%	48 Rapat & Koordinasi	144	75%
2.10.01.01.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga PTT	20 PTT	20 PTT	20 PTT	21 PTT	105%	21 PTT	20	100%
2.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
2.10.01.01.02.48	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38 Unit	33 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	51	134%

2.10.01.01.19	Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi									
2.10.01.01.19.02	Kegiatan Sewa Bandwith Internet Kantor Bupati	kuota internet Kantor Bupati	60 MBpS	60 MBpS	60 MBpS	60 MBpS	100%	60 MBpS	60	100%
2.10.01.01.19.03	Kegiatan Sewa Bandwith Transponder dan Internet Kecamatan	kuota internet Kantor Kecamatan	2,5 MBpS	2,5 MBpS	2,5 MBpS	2,5 MBpS	100%	2,5 MBpS	2,5 MBpS	100%
2.10.01.01.19.05	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemkab Malinau	Jumlah website yang dikelola	1 WEB	1 WEB	1 WEB	1 WEB	100%	1 WEB	1 WEB	100%
2.10.01.01.19.08	Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Jaringan Komputer	Jumlah jaringan yang terpelihara	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	100%	1 Jaringan	1 Jaringan	100%
2.10.01.01.19.10	Kegiatan Pemeliharaan CCTV Keamanan	Jumlah CCTV keamanan yang dikelola	350 CCTV	330 CCTV	330 CCTV	330 CCTV	100%	330 CCTV	350 CCTV	100%
2.10.01.01.20	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah									
2.10.01.01.20.01	Kegiatan Penyusunan Statistik Kabupaten Malinau	Jumlah buku statistik yang dibuat	4 Buku	2 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	4 Buku	4 Buku	100%
2.10.01.01.20.02	Kegiatan Penyusunan Infografis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen infografis pembangunan daerah yang dibuat	4 Buku	2 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	4 Buku	4 Buku	100%
2.10.01.01.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi									
2.10.01.01.21.02	Kegiatan Pengadaan BBM untuk Tower Telekomunikasi	Jumlah tower yang disuplai BBM	8 Tower	8 Tower	8 Tower	8 Tower	100%	8 Tower	8 Tower	100%
2.10.01.01.21.06	Diseminasi Informasi Melalui Media Digital	Jumlah informasi yang terdiseminasi	3 Media	3 Media	3 Media	3 Media	100%	3 Media	3 Media	100%

2.10.01.01.23	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo									
2.10.01.01.23.02	Kegiatan Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi	Jumlah BTS yang beroperasi dengan baik	7 Tower	2 Tower	7 Tower	7 Tower	100%	7 Tower	7 Tower	100%
2.10.01.01.23.03	Pemeliharaan Perangkat SISKOMPAD	Jumlah perangkat SISKOMPAD yang baik	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
2.10.01.01.24	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah									
2.10.01.01.24.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Jumlah APU yang ditingkatkan	2 APU	0 APU	2 APU	2 APU	100%	2 APU	2 APU	100%

N	=	TAHUN RENCANA
N-1	=	TAHUN BERJALANAN (SAAT INI)
N-2	=	1 TAHUN LALU
N-3	=	2 TAHUN LALU

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan Umum yaitu:

1. Pengembangan jaringan telekomunikasi seluler di Kabupaten Malinau dalam rangka menuntaskan/menghilangkan area blank spot di Kabupaten Malinau yang mana pada tahun 2020 cakupan sudah mencapai 95,41%;
2. Penyediaan layanan internet untuk SKPD dan Publik Area;
3. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik berupa Website, Media Sosial dengan persentase 65,20%;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyediakan data statistik sektoral untuk OPD dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang pada tahun 2020 baru bisa terealisasi sebesar 47,61%;
5. Tingkat keamanan informasi pemerintah yang terealisasi pada tahun 2020 masih dikisaran kurang aman.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Malinau 2020 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya:

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi relative masih rendah dan perlu ditingkatkan;
2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian belum memadai;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau belum terintegrasi secara baik dan lengkap;
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin meningkat dan beragam;

6. Wilayah geografis relative luas dengan tofografi medan yang sulit dijangkau dengan transportasi biasa;
7. Masih adanya wilayah Tower Blank Spot di Kabupaten Malinau.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompetensi yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi, tidak hanya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada setiap OPD di Kabupaten Malinau.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Malinau, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh OPD Kabupaten Malinau yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi eGovernment sebagai wujud pelayanan prima Kabupaten Malinau. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Malinau.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

Dengan adanya permasalahan dan hambatan serta tingkat kinerja layanan OPD, mempunyai dampak sebagai berikut:

1. Terhadap visi dan misi Kepada Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi ketiga yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**” tujuan OPD yang telah ditetapkan adalah ingin Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau untuk mencapai tujuan dimaksud makan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan akses

telekomunikasi seluler dan Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi.

2. Terhadap capaian program nasional
Secara nasional Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika berakhir sampai tahun 2014, yang selanjutnya hanya ada 6 (Enam) SPM dan bidang Komunikasi dan Informatika tidak termasuk didalamnya. Indikator kinerja disusun sesuai dengan kondisi Kab/Kota Masing masing, sehingga tiap daerah berbeda. Tingkat capaian SPM melebihi 100%, hal ini terjadi karena jika standard nasional untuk KIM adalah 1 (Satu) kelompok tiap kecamatan, di Kabupaten Malinau sudah menerapkan 1 (Satu) kelompok per desa dan berbasis IT.
3. Terhadap capaian program Internasional
Dalam melaksanakan program MDGs, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemberdayaan masyarakat dan aparatur Pemerintah melalui pembinaan dan pemberdayaan SDM agar menguasai teknologi informasi. Untuk nasional maupun internasional belum ada prestasi yang bisa dibanggakan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana komunikasi dan informasi untuk penyebaran informasi;
2. Belum optimalnya jaringan informasi antar lembaga komunikasi baik komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi pemerintah dengan pemerintah daerah;
3. Masih adanya beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi;
4. Masih belum ada sinergitas pengelolaan data dan informasi antar elemen sehingga masih terdapat data dan informasi yang belum komplit, konkrit, benar, valid dan relevan serta real time;
5. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pengelola IT;
6. Masih belum meratanya kepaahaman masyarakat dalam penggunaan dan memanfaatkan IT;
7. Konektifitas jaringan internet dan intranet SKPD belum optimal;
8. Belum keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government dan belum seluruh aplikasi yang ada terintegrasi;
9. Belum tersusunya tata kelola teknologi informasi secara lengkap.

Sedangkan peluang yang dapat diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

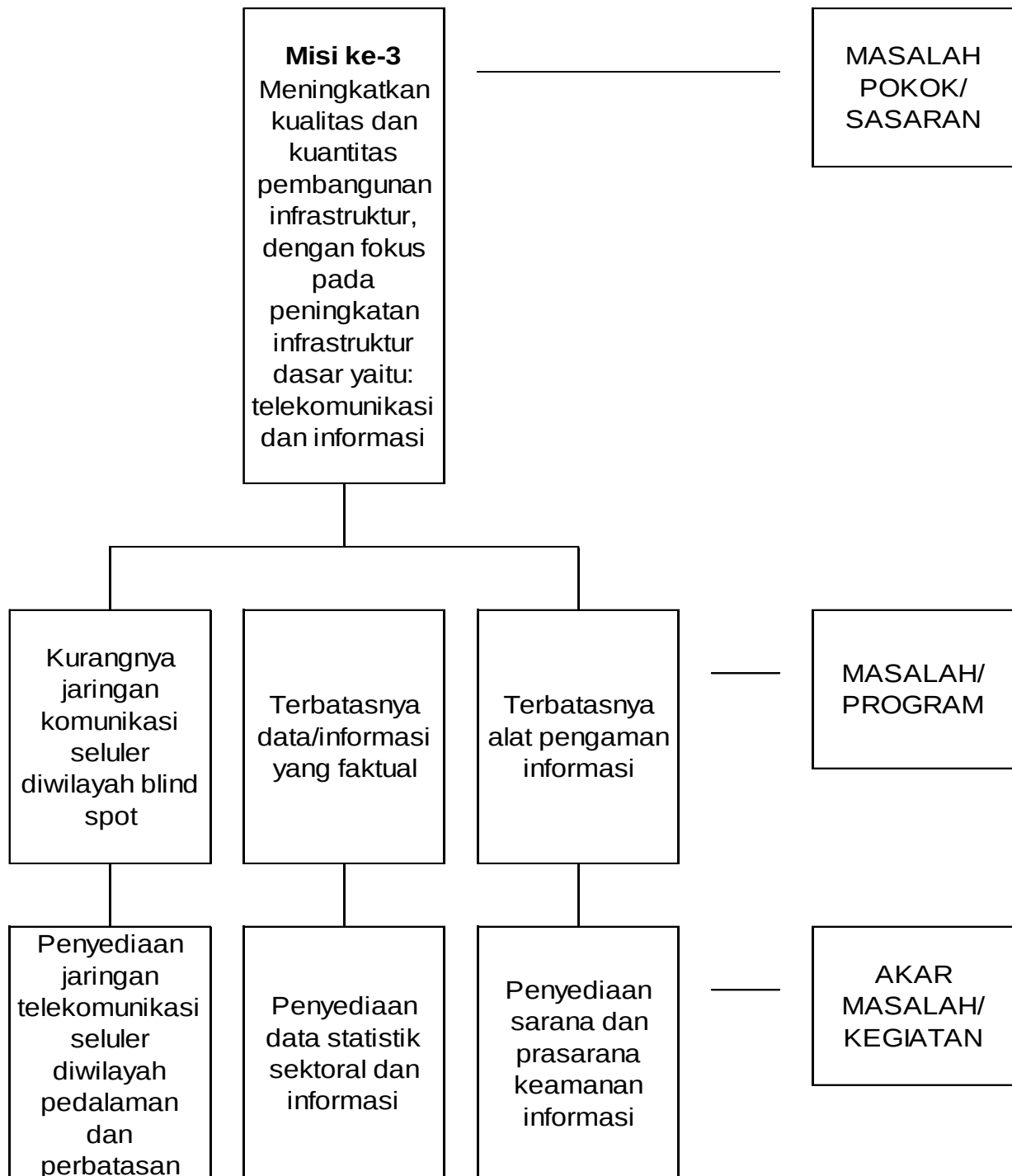
1. Meningkatnya kebutuhan keterbukaan informasi publik baik pada lingkup masyarakat, dunia bisnis dan antar pemerintah melalui berbagai media;
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan informasi antara lain komunitas blogger, komunitas RTIK, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT;
3. Adanya perguruan tinggi (Poltek Malinau dan SMK) yang mempunyai jurusan IT di Kabupaten Malinau;
4. Berkembangnya Kabupaten Malinau sebagai daerah wisata alam dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui: pengelolaan media center dan diadakannya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai publik relation diwilayahnya;
3. Melaksanakan Dialog Publik untuk menyerap aspirasi dari masyarakat;
4. Menyediakan mail PNS bagi pejabat struktural dan pemanfaatan Aplikasi Open Data Contract;
5. Pengelolaan website Pemkab Malinau dan semua SKPD;
6. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID;
7. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang;
8. Peningkatan kapasitas jaringan komputer SKPD dan Kecamatan;
9. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian ke semua SKPD.

POHON MASALAH



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan:

Program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau telah melalui proses/tahapan yang telah dijadwalkan sehingga pelaksanaannya diharapkan akan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut melalui proses panjang dan dengan perhitungan yang tepat untuk menghindari kesalahan perencanaan/penganggaran sehingga program/kegiatan dimaksud akan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran serta tepat waktu.

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

4. **Tabel T-C.31:**

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau

Komunikasi dan Informatika

1 dari 12

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase desa yang terjangkau komunikasi seluler	100%		85%	90%	98,17%	100%	95,41%	95,41%	98,17%	99,08%	
1.1			Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,61%	97,61%	97,61%	97,61%	100%	100%	100%	100%	
1.2			Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,61%	97,61%	97,61%	97,61%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.3			Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, Video, Teks, Data dan Sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			0	100%	0	100%	0	0	0	100%	
2.1			Persentase kegiatan (event), Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015	0	100%	0	100%	0	0	0	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.2			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	4,76%	4,76%	7,14%	7,14%	
2.3			Persentase perangkat daerah yang mengimplemen- tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangund- angan	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	4,76%	4,76%	7,14%	7,14%	
2.4			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasika- n secara elektronik	0	0	0	20%	0	0	0	20%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.5			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	0	0	20%	0	0	0	20%	
2.6			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	20%	0	0	0	20%	
2.7			Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0	0	0	20%	0	0	0	20%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.8			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0	0	0	2,38%	0	0	0	2,38%	
2.9			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	0	0	2,38%	0	0	0	2,38%	
2.10			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	0	0	2,38%	0	0	0	2,38%	
2.11			Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	0	0	2,38%	0	0	0	2,38%	
2.12			Persentase perangkat daerah yang mengimpleme ntasi inovasi yang mendukung samrt city	0	0	0	2,38%	0	0	0	2,38%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	0	22,22%	44,44%	0	0	22,22%	44,44%	
2.14			Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait E-Government	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			65,20%	65,20%	75,00%	75,00%	65,20%	75,00%	75,00%	75,00%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	0	19,05%	14,29%	14,29%	0	11,90%	14,29%	14,29%	
3.2			Persentase komunitas konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.3			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			45,00%	47,61%	59,52%	71,42%	45,00%	57,14%	59,52%	71,42%	
1.1			Tersedianya buku profil daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
1.2			Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
1.3			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
1.4			Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.5			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	
1.6			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.7			Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	96,66%	96,66%	96,66%	96,66%	100%	100%	96,66%	96,66%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah			Aman	Aman	Aman	Aman	Kurang aman	Kurang aman	Kurang aman	Kurang aman	
1.1			Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	0	0	8,33%	0	0	0	8,33%	
1.2			Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.3			Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4			Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	0	0	18,51%	0	0	0	18,51%	

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah: Diskominfo Kab. Malinau

Lembar 1 dari 4

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100	5.016.452.185	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan prima yang terlaksana	100	5.146.452.185	
1.1	Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	3.971.988.185	Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan		Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	3.971.988.185	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36 PNS	3.971.988.185	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36 PNS	3.971.988.185	
1.2	Kegiatan Administrasi Umum		Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	320.000.000	Kegiatan Administrasi Umum		Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	450.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	70.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Malinau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	48 Kali	150.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malinau	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	48 Kali	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Malinau	Jumlah Pakaian Dinas	50 Stel	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Malinau	Jumlah Pakaian Dinas	50 Stel	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Perlengkapannya	Malinau	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 ASN	50.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Perlengkapannya	Malinau	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 ASN	100.000.000	
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	672.464.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	672.464.000	

	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Perlengkapannya	Malinau	Jumlah penyediaan tenaga PTT	21 PTT	672.464.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Perlengkapannya	Malinau	Jumlah penyediaan tenaga PTT, ATK dan Biaya Makan Minum	12 Bulan	672.464.000	
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	100	52.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik	100	52.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	1 R-4	52.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Malinau	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	1 R-4	52.000.000	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	81,05	1.172.223.400	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	81,05	1.225.000.000	
2.5	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	81,05	1.172.223.400	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	81,05	1.225.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Malinau	Jumlah Informasi yang disebar dan media yang dipergunakan	12 Bulan	708.523.400	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Malinau	Jumlah Informasi yang disebar dan media yang dipergunakan	12 Bulan	600.000.000	

	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Buku Statistik Sektoral yang dibuat PPID Pembantu pada OPD Tersedianya infografis pembangunan daerah	3 Dokumen	463.700.000	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Buku Statistik Sektoral yang dibuat PPID Pembantu pada OPD Tersedianya infografis pembangunan daerah	3 Dokumen	625.000.000	
3	Program Aplikasi Informatika		Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	73,39	4.783.312.600	Program Aplikasi Informatika		Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	73,39	7.306.000.000	
3.6	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang baik yang disediakan oleh Dinas Kominfo	73,39	3.430.312.600	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang baik yang disediakan oleh Dinas Kominfo	73,39	5.306.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Malinau	Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan	6 Laporan Kegiatan	3.430.312.600	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Malinau	Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan	6 Laporan Kegiatan	5.306.000.000	
3.7	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, Video, Teks, Data dan Sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA	1.353.000.000	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, Video, Teks, Data dan Sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA	2.000.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Malinau	Jumlah Belanja jasa sewa License	4 Laporan	116.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Malinau	Jumlah Belanja jasa sewa License	4 Laporan	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Malinau	Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan	8 Laporan Kegiatan	1.237.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Malinau	Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan	8 Laporan Kegiatan	1.900.000.000	
	JUMLAH				10.971.988.185					13.677.452.185	

1

1

2

3

4

5

2

6

7

8

3

9

10

4

11

12

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui usulan-usulan yang di sampaikan melalui Musrembang Tingkat Desa dan Musrembang Tingkat Kecamatan. Pembahasan yang telah dilakukan dimaksud adalah untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Proses bagaimana usulan program/kegiatan Desa/Masyarakat tersebut diperoleh yaitu Usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan hasil Musrembang yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan tahapan di mulai dari Musrembang tingkat Desa dan Musrembang Tingkat Kecamatan. Jadi telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu bahwa Semua usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melaui tahapan MusrembangDes dan MusrembangCam yang mana sudah sesuai dengan isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran 2022.

Penelaahan usulan Program/Kegiatan dimaksud dapat kami sajikan pada tabel **T-C.32** sebagai berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2022 Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Usulan Musrembang				
1	Pengadaan Monitor Informasi Umum	Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota	Tersedianya Monitor Informasi Umum	1 Unit	Tidak diakomodir karena Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa
2	Pengadaan Perlengkapan (HT) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Lokasi Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota	Tersedianya Handy Talky	-	Tidak diakomodir karena Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa
3	Pemasangan tower Telekomunikasi	Desa Seruyung Kec. Malinau Utara	Tersedianya jaringan telekomunikasi seluler	1 Tower	Diakomodir dan akan dikoordinasikan dan diusulkan kepada BAKTI Kementerian Kominfo RI
4	Pengadaan Pengadaan penguat jaringan	Lokasi Desa Seruyung Kec. Malinau Utara	Tersedianya penguat jaringan/sinyal	-	Tidak diakomodir karena Telah diakomodir dalam program BTS USO

					Kemenkominfo RI
5	Pembangunan tower telkomsel	Desa Sembak Warot	Tersedianya jaringan Telkomsel	1 Jaringan	Tidak diakomodir karena Sedang dilakukan komunikasi dengan pihak PT. TELKOMSEL Tarakan tentang pemanfaatan tower telekomunikasi di Desa Salap
6	Pembuatan Website Desa	Desa Malinau Seberang	Tersedianya Website Desa	1 Web	Tidak diakomodir karena diharapkan dapat menggunakan alokasi dana desa
7	Pengadaan Wifi Kantor Desa	Desa Long Bila Kec. Malinau Barat	Tersedianya alat Wifi	1 unit	Tidak diakomodir karena diharapkan dapat menggunakan alokasi dana desa
8	Penambahan Kapasitas jaringan 4G	Desa Harapan Maju dan Desa Paking Kec. Mentarang	Peningkatan kapasitas dari 3G menjadi 4G	4G	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
9	Penyediaan Tenaga Ahli Telekomunikasi (Operator)	Lokasi Desa Lg. Semau Kec. Mentarang	Tersedianya tenaga ahli telekomunikasi desa	2 orang	Akan diusahakan ASN Diskominfo melatih untuk tenaga

		ang Hulu			telekomunika si di desa tersebut
10	Pengadaan Papan Panel surya Tower Telekomunikasi	Desa Lg. Barang Kec. Mentarang Hulu	Tersedianya Papan Panel surya Tower Telekomunikasi	1 unit	Diakomodir dalam kegiatan Pengadaan Catu Daya Tower Telekomunikasi
11	Peningkatan Jaringan Telepon Menjadi 3G/Berakses Internet yang Baik	Lokasi Desa Lg. Barang Kec. Mentarang Hulu	Tersedianya jaringan 3G	3G	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
12	Peningkatan Kapasitas Alat Telekomunikasi	Desa Lokasi Desa Lg. Kebinu, Lg. Semamu, Lg. Sulit, Lg. Pala, Lg. Simau, Lg. Mekatif Kec. Mentarang Hulu	Meningkatnya Kapasitas Alat Telekomunikasi	6 Kantor Desa	Tidak diakomodir karena akan diajukan pada program BTS USO Kemenkominfo RI
13	Pengadaan Baterai/Aki Tower Telekomunikasi	Desa Lg. Barang Kec. Mentarang Hulu	Tersedianya Baterai/Aki Tower Telekomunikasi	1 Desa	Tidak diakomodir karena sudah dilaksanakan pada tahun 2019
14	Pengadaan Jaringan Seluler	Lokasi Dusun Nansarang,	Tersedianya jaringan telekomunikasi seluler	3 Dusun	Tidak diakomodir karena akan diajukan

		Dusun Bang Biau, Dusun Lung Kec. Mentarang Hulu			pada program BTS USO Kemenkominfo RI
15	Pengadaan Akses Internet	Desa Lg. Sulit	Tersedianya akses internet	1 Desa	Tidak diakomodir karena dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa
16	Penambahan Kekuatan Jaringan Internet	Desa Long Pada, Long Nyau, Long Ranau, Long Titi dan Desa Rian Tubu Kec. Sungai Tubu	Tersedianya jaringan internet	5 Desa	Tidak diakomodir karena jaringan BTS USO di desa-desa tersebut sudah 4G
17	Penambahan Kapasitas jaringan 4G	Desa Long Alango Kec. Bahau Hulu	Tersedianya jaringan 4G	4G	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
18	Pemeliharaan Menara BTS / Tower Telekomunikasi	Desa Long Alango Kec. Bahau Hulu	Terpeliharanya Tower Telekomunikasi	12 Bulan	Diakomodir dalam kegiatan Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi
19	Pengadaan Wifi Kantor Desa	Lokasi Kantor Desa Long	Tersedianya Wifi Kantor Desa	1 Unit	Tidak Diakomodir karena Kegiatan

		Alango Kec. Bahau Hulu			tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa
20	Penambahan Kapasitas jaringan 4G	Lokasi Desa Long Nawang Kec. Kayan Hulu	Tersedianya jaringan 4G	4G	Akan di koordinasi dengan pihak Telkomsel/Indosat
21	Pengadaan Modul dan Batrai Tower	Desa Long Nawang Kec. Kayan Hulu	Tersedianya Modul dan Batrai Tower	1 Desa	Tidak diakomodir karena Kegiatan tersebut akan diajukan pada tahun 2023
22	Pengadaan BBM untuk Tower Telekomunikasi	Lokasai Desa Lg. Ampung Kec. Kayan Selatan	Tersedianya BBM untuk Operasional Tower Telekomunikasi	12 Bulan	Diakomodir dalam kegiatan Pengadaan BBM untuk Tower Telekomunikasi
23	Semenisasi Menuju Tower Telekomunikasi	Desa Lg. Ampung Kec. Kayan Selatan	Panjang semenisasi menuju tower telekomunikasi	-	Tidak diakomodir karena Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa
24	Penguat Sinyal Telekomunikasi	Desa Lg. Ampung Kec. Kayan Selatan	Tersedianya alat penguat sinya	1 unit	Tidak diakomodir karena Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa

25	Pembangunan Radio SSB Kantor Camat Kayan Selatan	Lokasi RT-3 Desa Long Ampun g Kec. Kayan Selatan	Tersedianya stasion SSB	1 unit	Tidak diakomodir karena Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa
26	Pembangunan Stasiun Radio SSB Kelima Desa Se-Kecamatan Kayan Selatan	Se-Kecamatan Kayan Selatan	Tersedianya stasion SSB	5 unit	Tidak diakomodir karena Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa
27	Pembanguna Stasiun Alat Komunikasi Alternatif Radio Penghubung Antara Penduduk Rig di Lima Desa	Se-Kecamatan Kayan Selatan	Tersedianya stasion SSB	5 unit	Tidak diakomodir karena Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Desa
(2)	Pokir DPRD				
1	Pembangunan Tower Telekomunikasi	Desa Long Sulit Kec. Mentarang Hulu	Tersedianya jaringan telekomunikasi seluler	1 Tower telekomunikasi	Tidak diakomodir karena akan diajukan pada program BTS USO Kemenkominfo RI

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019 bahwa program utama nasional bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
- c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementrian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Mengacu pada program utama Kementrian Komunikasi dan Informatika tersebut diatas pada dasarnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau dan permasalahan yang akan di tuntaskan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi;
7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;
8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah:

Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau

**Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau Tahun 2022**

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1	Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau	Persentase desa yang memiliki akses telekomunikasi seluler	Meningkatkan akses telekomunikasi seluler	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	99,08%
		Persentase ketersediaan data statistik daerah	Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	100%
				Persentase informasi umum yang disebarkan	75%
				Persentase layanan keamanan informasi	8,33%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah RPJMD 2016-2021 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur pembangunan daerah baik perkotaan, pedesaan, pedalaman maupun perkotaan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar yaitu jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**. Dengan menetapkan Tujuan: Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau.

- b. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM)
Selain mendukung visi dan misi kepala daerah, kegiatan tahun 2022 juga harus sesuai dengan SPM yang ditetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika.
 - c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
Tugas fungsi dan pokok Diskominfo Kabupaten Malinau diharapkan membantu pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
 - d. Pengembangan daerah terisolir
Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi memiliki luas wilayah yang luas dan masih banyak Kecamatan/Desa yang masih terisolir untuk itulah peran daripada Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil peran untuk menghubungkan daerah-daerah yang terisolir tadi melalui jalur Komunikasi dan Informatika.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program/Kegiatan/Sub Kegiatan:
Pada tahun 2022 Diskominfo Kabupaten Malinau direncanakan akan melaksanakan 3 program, 7 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan;
 - Sifat Penyebaran lokasi program/kegiatan/sub kegiatan:
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun 2022 lebih banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Malinau, untuk luar wilayah Kabupaten Malinau hanya merupakan kegiatan seperti Rapat-rapat koordinasi/konsultasi ataupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya spesifik.
Ada 3 Sub Kegiatan yang terfokus pada kawasan/kelompok masyarakat tertentu yaitu:
 - 1. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik:
Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Sub Kegiatan ini adalah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
 - 2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah:
Kegiatan ini berupa Pengadaan WIFI untuk Masyarakat di Arena Pelangi Intimung, Pengadaan BBM untuk Tower Telekomunikasi, Sewa bandwidth internet Kantor Bupati, Sewa bandwidth Transponder dan Internet Kecamatan, Sewa internet 3 Kantor Camat di wilayah FO, Sewa Lisensi Zoom Pro.

3. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;

Beberapa kegiatan penting untuk masyarakat yaitu berupa kegiatan Pemeliharaan Perangkat Internet Kecamatan, Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi, Pengadaan CCTV Arena Pelangi Intimung, pengadaan 1 Unit Genset Tower Telekomunikasi.

- Dari hasil Rencana Kerja Awal yang telah dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 3 Maret 2021** disepakati kebutuhan dana/pagu indikatif untuk Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 10.971.988.185,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah),

- c. Penjelasan jika rumusan program/kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Tidak ada penjelasan.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan berdasarkan tabel **T-C.33** sebagai berikut:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan prima yang terlaksana		100	5.016.452.185	APBD		100	5.146.452.185
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100	3.971.988.185	APBD		100	3.971.988.185
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Malinau	36 PNS	3.971.988.185	APBD		36 PNS	3.971.988.185
1.2	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		100	320.000.000	APBD		100	450.000.000
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Malinau	3 Unit	70.000.000	APBD		5 Unit	100.000.000
1.2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	Malinau/Pro v/Pusat	48 kali	150.000.000	APBD		48 kali	200.000.000
1.2.4	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Malinau	50 stel	50.000.000	APBD		50 stel	50.000.000
1.2.5	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Perlengkapannya	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Malinau/Pro v/Pusat	4 ASN	50.000.000	APBD		6 ASN	100.000.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		100	672.464.000	APBD		100	672.464.000

1.3.6	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan tenaga PTT	Malinau	21 PTT	672.464.000			12 Bulan	672.464.000
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik		100	52.000.000	APBD		100	52.000.000
1.4.7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	Malinau	1 R-4	52.000.000	APBD		1 R-4	52.000.000
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		81,05	1.172.223.400	APBD		94,12	1.225.000.000
2.5	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota		81,05	1.172.223.400	APBD		94,12	1.225.000.000
2.5.8	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang disebar dan media yang dipergunakan	Malinau	12 Bulan	708.523.400	APBD		12 Bulan	600.000.000
2.5.9	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Buku Statistik Sektoral yang dibuat PPID Pembantu pada OPD Tersedianya infografis pembangunan daerah	Malinau	3 Dokumen	463.700.000	APBD		3 Dokumen	625.000.000
3	Program Aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		73,39	4.783.312.600	APBD		82,12	7.306.000.000
3.6	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang baik yang disediakan oleh Dinas Kominfo		73,39	3.430.312.600	APBD		82,12	5.306.000.000

3.6.10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan	Malinau	6 Laporan Kegiatan	3.430.312.600	APBD		6 Laporan Kegiatan	5.306.000.000
3.7	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, Video, Teks, Data dan Sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		YA	1.353.000.000	APBD		YA	2.000.000.000
3.7.11	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Belanja jasa sewa License	Malinau	4 Laporan	116.000.000	APBD		4 Laporan	100.000.000
3.7.12	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan	Malinau	8 Laporan Kegiatan	1.237.000.000	APBD		8 Laporan Kegiatan	1.900.000.000
JUMLAH					10.971.988.185				13.677.452.185

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Rencana Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan	Skala Prioritas
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.016.452.185	
1.1		Kegiatan Administrasi Keuangan		3.971.988.185	
1.1.1			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.971.988.185	1
1.2		Kegiatan Administrasi Umum		320.000.000	
1.2.2			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	1
1.2.3			Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	1
1.2.4			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	50.000.000	2
1.2.5			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	2
1.3		Kegiatan Penyediaan Jasa		672.464.000	

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.3. 6			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	672.464.000	1
1.4		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		52.000.000	
1.4. 7			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000	1
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik			1.172.223.400	
2.5		Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1.172.223.400	
2.5. 8			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	708.523.400	1
2.5. 9			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	463.700.000	1
3	Program Aplikasi informatika			4.783.312.600	
3.6		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan		3.430.312.600	

		Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Ko ta			
3.6.1 0			Sub Kegiatan Penyelenggara an Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.430.312.600	1
3.7		Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Ko ta		1.353.000.000	
3.7.11			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	116.000.000	1
3.7.12			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.237.000.000	1

Form keterangan rincian sub kegiatan:

No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Rencana Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.016.452.185	
1.1		Kegiatan Administrasi Keuangan		3.971.988.185	
1.1.1			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.971.988.185	
1.2		Kegiatan Administrasi Umum		320.000.000	
1.2.2			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
1.2.3			Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
1.2.4			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	50.000.000	
1.2.5			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	
1.3		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		672.464.000	
1.3.6			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	672.464.000	
1.4		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		52.000.000	
1.4.7			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik			1.172.223.400	
2.5		Kegiatan Pengelolaan		1.172.223.400	

		Media Komunikasi Publik			
2.5.8			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	708.523.400	
				Diseminasi Informasi melalui Media Digital	225.000.000
				Kontent Berita Online	483.523.400
2.5.9			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	463.700.000	
				Penguatan Layanan Informasi Publik/PPID	100.000.000
				Penyediaan buku statistik sektoral dan infografis pemb. Daerah	288.700.000
				Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	75.000.000
3	Program Aplikasi informatika			4.783.312.600	
3.6		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.430.312.600	
3.6.10			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.430.312.600	
				Pengadaan WIFI untuk Masyarakat di Arena Pelangi Intimung	90.000.000
				Pengadaan BBM untuk Tower Telekomunikasi	1.123.312.600
				Sewa bandwidth internet Kantor Bupati	746.000.000
				Sewa bandwidth Transponder dan Internet Kecamatan	1.400.000.000
				Sewa internet 3 Kantor Camat di wilayah FO	41.000.000
				Sewa Lisensi Zoom Pro	30.000.000
3.7		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.353.000.000	
3.7.11			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	116.000.000	
				Belanja jasa sewa License (Cpanel, Domain, Anti Virus)	116.000.000
3.7.12			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	1.237.000.000	

			Komunikasi Pemerintah Daerah		
				Pemeliharaan CCTV Keamanan	150.000.000
				Pemeliharaan Perangkat Internet Kecamatan	200.000.000
				Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi	207.000.000
				Pengadaan CCTV Arena Pelangi Intimung	50.000.000
				Pemeliharaan Perangkat Jaringan Komputer	100.000.000
				Pengembangan dan Pengelolaan Website Pmkab Malinau	100.000.000
				Pengadaan 1 Unit Genset Tower Telekomunikasi	200.000.000
				Pengadaan 10 Unit Perangkat Pendukung Vicon	230.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika tahunan yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2022. Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Utara, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tahun 2022 ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh ASN baik PNS maupun PTT di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Malinau pada umumnya.

Malinau, Rabu 17 Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau,



Drs. Agustinus, M.AP

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670217 199312 1 001

Catatan penting

Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana tindak lanjut